



Kepemimpinan Trump dan Nasionalisme Sumber Daya: Refleksi terhadap Kemandirian Doktrin Pertahanan Indonesia

Didik Iwan¹, Ali Isnen Pasaribu², Tarsisius Susilo³,
Budiman Marpaung⁴, Bambang Budi Kuncoro⁵

Sekolah Staf dan Komando TNI (SESKO TNI)^{1,2,3,4,5}

didikiwans443@gmail.com, aliseskotni54@gmail.com, muchsus70@gmail.com, bidimanmarpaungg@gmail.com,
budikuncoro99aau@gmail.com

Article Info	ABSTRACT
Keywords: Gaya kepemimpinan, Donald Trump, nasionalisme sumber daya, doktrin pertahanan Indonesia, Pancasila	Dinamika geopolitik global saat ini menunjukkan kompleksitas persaingan sumber daya dan kekuatan strategis antarnegara besar, di mana gaya kepemimpinan para tokoh dunia memainkan peran penting dalam orientasi nasional dan doktrin pertahanan. Penelitian ini bertujuan menganalisis gaya kepemimpinan Donald Trump yang menekankan <i>America First</i> , kemandirian industri pertahanan, dan pengelolaan energi sebagai instrumen strategis, serta menilai implikasinya terhadap pengembangan doktrin pertahanan Indonesia yang berlandaskan Pancasila, nilai kejuangan TNI, dan visi Indonesia Emas 2045. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur, analisis kebijakan, dan teori kepemimpinan transformasional, adaptif, dan strategis militer, dilengkapi analisis doktrin pertahanan, logistik, energi, dan kesiapan multi-domain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian sumber daya, proteksionisme industri, dan kesiapan logistik yang menjadi ciri kepemimpinan Trump dapat diadaptasi untuk Indonesia, namun harus disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila dan kejuangan TNI agar tetap inklusif, etis, dan berorientasi kesejahteraan rakyat. Rekomendasi strategis mencakup pembangunan industri pertahanan domestik, penguatan cadangan energi, pengembangan SDM dan teknologi, serta modernisasi doktrin multi-domain yang adaptif, mandiri, dan tanggap terhadap ancaman modern. Penerapan strategi ini diharapkan memperkuat kedaulatan nasional sekaligus mendukung pembangunan pertahanan yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
This is an open access article under the CC BY-NC license 	Corresponding Author: Didik Iwan Sekolah Staf dan Komando TNI (SESKO TNI) Bandung, Jawa barat, Indonesia didikiwans443@gmail.com

PENDAHULUAN

Dinamika geopolitik dan geostrategi global saat ini menunjukkan kompleksitas yang semakin tinggi, di mana interaksi antarnegara tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan militer dan ekonomi, tetapi juga oleh teknologi, energi, dan informasi (Asfar, Wicaksana and Asfar, 2025). Pergeseran keseimbangan kekuatan serta persaingan untuk mengamankan sumber daya strategis membuat negara-negara dituntut untuk membangun kapasitas nasional yang adaptif, mandiri, dan responsif terhadap berbagai ancaman. Dalam kepemimpinan nasional menjadi faktor penting karena mampu menentukan arah kebijakan strategis, prioritas nasional, dan mekanisme mobilisasi sumber daya secara efektif. Kepemimpinan yang visioner dan strategis tidak hanya mempengaruhi keputusan politik, tetapi juga berperan dalam membangun sistem pertahanan yang mampu mengantisipasi ancaman multi-domain, termasuk ancaman konvensional maupun non-konvensional seperti siber, informasi, dan disrupsi rantai pasok (Leoni, 2021).

Pertahanan modern menuntut integrasi yang efektif antara elemen material dan non-material, mulai dari kesiapan logistik, pengelolaan energi, hingga pengembangan kapasitas industri pertahanan dan sumber daya manusia. Manajemen sumber daya yang efisien serta kemampuan inovasi teknologi

menjadi elemen penentu dalam memastikan kesiapan dan daya tangkal nasional (Bentley, 2023). Doktrin pertahanan harus mampu menjawab tantangan global yang bersifat dinamis dan hybrid, memadukan aspek militer, ekonomi, informasi, dan politik, serta menekankan prinsip keberlanjutan, etika, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai nasional. Integrasi berbagai disiplin ilmu kepemimpinan, geopolitik, ekonomi, teknologi, dan industri menjadi kunci untuk membangun sistem pertahanan yang efektif, adaptif, dan berkarakter (Bhakti *et al.*, 2024).

Selain aspek teknis dan operasional, fondasi normatif seperti etika, nilai kejuangan, dan identitas nasional menjadi sangat penting dalam membentuk strategi pertahanan yang kokoh. Strategi yang hanya kuat secara materi tanpa memperhatikan nilai moral dan karakter bangsa dapat menimbulkan risiko jangka panjang, termasuk ketimpangan sosial dan kerentanan terhadap tekanan eksternal. Oleh karena itu, pembangunan doktrin pertahanan harus sejalan dengan prinsip-prinsip nasional yang menjunjung keadilan, keberlanjutan, dan kepentingan rakyat (Wicaksana and Yakti, 2025).

Dengan menempatkan kepemimpinan strategik sebagai pusat pengelolaan sumber daya dan pembangunan doktrin, Indonesia dapat merancang pertahanan nasional yang tidak hanya siap menghadapi ancaman global, tetapi juga memperkuat kedaulatan, stabilitas regional, dan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara kesiapan operasional dan penguatan nilai-nilai fundamental bangsa, sehingga doktrin pertahanan menjadi adaptif, berkarakter, dan mampu mendukung visi jangka panjang Indonesia menuju masa depan yang aman, mandiri, dan berdaulat (Ernada, Molasy and Prabhawati, 2024).

Kajian mengenai gaya kepemimpinan Donald Trump telah banyak dilakukan, khususnya dalam politik luar negeri, komunikasi politik, dan identitas nasional. (Ali, no date) menyoroti bagaimana retorika *Make America Great Again* menjadi basis narasi politik Trump yang berhasil mengaktivasi *banal nationalism* menjadi nasionalisme agresif dalam mobilisasi publik. (Wibawa, 2025) menekankan kebijakan luar negeri unilateral dan nasionalisme ekonomi Trump yang merefleksikan kecenderungan proteksionisme, sekaligus mengonstruksi relasi internasional Amerika Serikat secara eksklusif. (Roza *et al.*, no date) menelaah dampak kepemimpinan Trump dalam diplomasi sains melalui *US Science Envoy Program*, dengan temuan bahwa gaya kepemimpinan Trump yang berorientasi nasionalisme dan *low conceptual complexity* justru menimbulkan hambatan kolaborasi global. Sementara itu, (Aswan, 2025) membandingkan kepemimpinan idiosinkratik Trump dan Joe Biden, dan menemukan bahwa Trump lebih menekankan pada *transactional foreign policy* berbasis kepentingan jangka pendek. Dari penelitian-penelitian tersebut terlihat bahwa fokus kajian masih dominan pada aspek komunikasi politik, diplomasi, dan kebijakan luar negeri, sementara dimensi implikasi terhadap doktrin pertahanan khususnya relevansi untuk Indonesia masih belum banyak dieksplorasi.

Meskipun gaya kepemimpinan Donald Trump dengan doktrin *America First* berhasil mendorong kemandirian industri pertahanan dan energi Amerika Serikat, refleksi yang mendalam mengenai relevansi model ini bagi Indonesia belum banyak dikaji secara sistematis. Padahal, Indonesia saat ini menghadapi spektrum ancaman *multi-domain* seperti *cyber warfare*, kompetisi *grey-zone*, dan ketergantungan impor alutsista yang berpotensi melemahkan kemandirian pertahanan nasional. Permasalahan utamanya adalah bagaimana mengambil pelajaran dari kepemimpinan Trump tanpa terjebak dalam nasionalisme proteksionis yang dapat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan diplomasi bebas-aktif Indonesia. Selain itu, terdapat kesenjangan dalam literatur yang umumnya hanya menyoroti kepemimpinan Trump dari perspektif politik dan identitas nasional, tanpa menjembatani ke dalam desain *defense doctrine* yang operasional bagi TNI.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis gaya kepemimpinan Donald Trump dalam perspektif geopolitik dan strategi pertahanan, serta merefleksikan implikasinya bagi doktrin pertahanan Indonesia. Secara akademis, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan literatur dengan mengaitkan kepemimpinan global khususnya Trump dengan kebutuhan Indonesia dalam membangun doktrin pertahanan adaptif, mandiri, dan berbasis Pancasila. Secara praktis, penelitian ini bertujuan menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat kemandirian logistik pertahanan, pembangunan industri pertahanan nasional, serta pengelolaan sumber daya energi sebagai instrumen geopolitik, menuju visi Indonesia Emas 2045.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan Indonesia untuk merumuskan doktrin pertahanan yang lebih adaptif di tengah dinamika geopolitik global. Tren nasionalisme sumber daya yang

diperlihatkan oleh Trump membuktikan bahwa kemandirian energi dan industri pertahanan merupakan pilar penting bagi keamanan nasional. Indonesia, dengan posisi strategis di Indo-Pasifik, rentan terhadap kerentanan rantai pasok global, ketergantungan teknologi militer asing, serta ancaman non-konvensional yang terus berkembang. Oleh karena itu, mengkaji kepemimpinan Trump tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga mendesak secara strategis untuk merumuskan doktrin pertahanan Indonesia yang berdaulat, adaptif, dan berbasis nilai kejuangan TNI serta falsafah Pancasila.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang menghubungkan studi kepemimpinan global Donald Trump dengan desain doktrin pertahanan Indonesia. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang berfokus pada narasi politik (*Make America Great Again*), diplomasi unilateral, atau perbandingan gaya kepemimpinan dengan tokoh lain, penelitian ini menawarkan analisis yang mengaitkan langsung prinsip nasionalisme sumber daya dengan kebutuhan pembangunan *defense industry base*, kemandirian logistik, serta doktrin pertahanan multi-domain Indonesia. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memperkaya literatur akademik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi konseptual yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan pertahanan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis kebijakan, karena fokus utama kajian terletak pada pemahaman yang mendalam terhadap gaya kepemimpinan Donald Trump dan relevansinya bagi doktrin pertahanan Indonesia. Data utama diperoleh dari literatur akademik berupa buku, jurnal ilmiah, laporan *think tank* internasional, serta dokumen resmi kebijakan pertahanan Amerika Serikat dan Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan sumber sekunder dari artikel penelitian terdahulu yang membahas gaya kepemimpinan Trump, serta bila memungkinkan, memperkaya data dengan perspektif pakar geopolitik dan praktisi militer melalui wawancara atau diskusi panel.

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan beberapa alat analisis. Pertama, analisis komparatif untuk mengkaji persamaan dan perbedaan antara gaya kepemimpinan Trump dengan kebutuhan pertahanan Indonesia. Kedua, penerapan teori kepemimpinan, yaitu kepemimpinan *transformasional* (Burns, Bass), kepemimpinan *adaptif* (Heifetz), dan kepemimpinan strategis militer, agar diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai karakteristik kepemimpinan Trump dalam nasionalisme sumber daya. Ketiga, analisis doktrin pertahanan yang meliputi aspek *force development*, *logistics sustainment*, dan *readiness*, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi konkret bagi pengembangan doktrin TNI.

Proses penelitian dilaksanakan melalui empat tahap sistematis. Tahap pertama adalah identifikasi literatur dan pengumpulan data kebijakan yang relevan dengan gaya kepemimpinan Trump dan prinsip *America First*. Tahap kedua, data dianalisis menggunakan kerangka teori kepemimpinan dan strategi militer untuk memahami implikasinya terhadap pembangunan industri pertahanan dan energi. Tahap ketiga, hasil analisis direfleksikan dalam falsafah Pancasila, nilai kejuangan TNI, serta arah pembangunan pertahanan menuju Indonesia Emas 2045. Tahap terakhir adalah formulasi rekomendasi strategis yang bersifat aplikatif, sehingga penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan doktrin pertahanan Indonesia.

Kerangka teori penelitian ini berlandaskan pada tiga pilar utama, yaitu teori kepemimpinan, konsep nasionalisme sumber daya, dan falsafah pertahanan Indonesia. Pertama, teori kepemimpinan yang digunakan mencakup kepemimpinan *transformasional* (James MacGregor Burns, Bernard Bass) yang menekankan inspirasi dan motivasi kolektif, kepemimpinan *adaptif* (Ronald Heifetz) yang relevan dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis yang dinamis, serta kepemimpinan strategis militer yang berakar pada pemikiran Clausewitz dan konsep modern tentang kepemimpinan dalam operasi multidomain. Kedua, konsep nasionalisme sumber daya menyoroti keterkaitan antara energi, industri pertahanan, dan keamanan nasional sebagai basis kedaulatan negara. Ketiga, falsafah pertahanan Indonesia menegaskan Pancasila, nilai kejuangan TNI, dan visi Asta Cita 2045 sebagai bingkai normatif dalam merumuskan strategi pertahanan nasional yang adaptif dan berkarakter Indonesia.

Tabel 1. Kerangka Teori Penelitian

Aspek	Teori/Konsep Utama	Relevansi Penelitian
-------	--------------------	----------------------

Teori Kepemimpinan	1. Transformasional (Burns, Bass) 2. Adaptif (Heifetz) 3. Strategis Militer (Clausewitz, kepemimpinan strategik modern)	Menjadi landasan analisis gaya kepemimpinan Trump dalam memobilisasi sumber daya dan strategi pertahanan.
Nasionalisme Sumber Daya	Hubungan energi, industri pertahanan, dan keamanan nasional	Memberikan kerangka pemahaman atas doktrin <i>America First</i> dan kemandirian sumber daya.
Falsafah Pertahanan Indonesia	Pancasila, nilai kejuangan TNI, Asta Cita 2045	Menjadi bingkai normatif untuk mengadaptasi pelajaran dari kepemimpinan Trump ke Indonesia.

Kerangka teori ini memperlihatkan keterhubungan antara gaya kepemimpinan, pengelolaan sumber daya strategis, dan filosofi pertahanan nasional. Dengan menggabungkan teori kepemimpinan *transformasional*, *adaptif*, dan strategis militer, penelitian ini mampu mengungkap dimensi ideologis dan praktis dari kepemimpinan Trump yang berorientasi pada kemandirian sumber daya. Konsep nasionalisme sumber daya menjadi kunci untuk menjelaskan bagaimana energi dan industri pertahanan berfungsi sebagai instrumen kekuatan geopolitik. Sementara itu, falsafah pertahanan Indonesia memastikan bahwa adaptasi model kepemimpinan global tetap sejalan dengan nilai Pancasila, kejuangan TNI, dan visi strategis menuju Indonesia Emas 2045.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Gaya Kepemimpinan Donald Trump

Kebijakan *America First* merupakan inti dari kepemimpinan Donald Trump sejak masa kampanye hingga menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat periode 2017–2021. Konsep ini tidak sekadar slogan politik, melainkan doktrin nasionalisme proteksionis yang mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari ekonomi, energi, perdagangan, hingga pertahanan. Salah satu elemen terpenting adalah fokus pada kemandirian logistik dan industri pertahanan. Trump meyakini bahwa sebuah negara adidaya seperti Amerika Serikat tidak boleh bergantung secara berlebihan pada impor, terutama dalam bidang industri strategis seperti baja, aluminium, teknologi pertahanan, serta komponen elektronik penting. Oleh karena itu, ia memberlakukan tarif impor tinggi terhadap baja dan aluminium dari negara-negara mitra, dengan alasan melindungi keamanan nasional (Yufriadi, 2023).

Kebijakan ini memicu dinamika global karena bertolak belakang dengan prinsip liberalisasi perdagangan internasional yang selama ini didorong oleh Amerika Serikat sendiri. Namun, dari perspektif kepemimpinan strategis, kebijakan tersebut mencerminkan pandangan realistik bahwa ketergantungan pada pasokan luar negeri berpotensi menjadi kerentanan geopolitik. Dalam logistik pertahanan, kemandirian menjadi prasyarat untuk menghadapi konflik berskala besar tanpa terganggu oleh embargo atau disruption rantai pasok global.

Selain sektor industri pertahanan, *America First* juga menekankan pada re-industrialisasi. Trump berusaha menghidupkan kembali industri manufaktur dalam negeri yang sebelumnya banyak dialihkan ke negara-negara dengan biaya tenaga kerja rendah seperti Tiongkok dan Meksiko. Dalam berbagai pidatonya, ia menekankan bahwa kedaulatan Amerika tidak bisa dilepaskan dari kapasitas industri domestik. Re-industrialisasi ini dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat basis ekonomi sekaligus menyiapkan kemampuan mobilisasi sumber daya nasional apabila terjadi krisis atau perang besar (Duarte and Sos, 2025).

Hal lain yang tidak kalah penting adalah kemandirian energi. Amerika Serikat di bawah Trump bertransformasi dari negara importir energi menjadi eksportir energi bersih. Hal ini terjadi berkat eksploitasi besar-besaran terhadap sumber energi *shale gas* dan minyak bumi. Dengan capaian ini, Trump mengklaim bahwa AS tidak lagi harus “berlutut” di hadapan negara-negara penghasil energi Timur Tengah. Secara geopolitik, energi dijadikan alat untuk memperluas pengaruh global, di mana ekspor LNG Amerika diarahkan ke Eropa sebagai alternatif dari ketergantungan pada gas Rusia (Purba, Windiani and Paramasatya, 2022).

Karakter kepemimpinan Donald Trump dapat dikategorikan sebagai populis–nasionalis, proteksionis, dan transactional leadership. Dari sisi populisme, Trump sangat mahir membangun komunikasi politik yang langsung menyentuh basis massa domestiknya, terutama kelompok kelas menengah ke bawah yang merasa terpinggirkan oleh globalisasi. Retorika *Make America Great Again* adalah bentuk konkret bagaimana populisme digunakan untuk membangkitkan nasionalisme banal menjadi nasionalisme aktif.

Sementara itu, sifat proteksionisnya tercermin dari kebijakan perdagangan, energi, dan pertahanan yang menekankan perlindungan industri domestik dari kompetisi global. Proteksionisme ini bukan semata isu ekonomi, tetapi menyentuh dimensi pertahanan, karena Trump menganggap industri strategis adalah fondasi kedaulatan negara. Berbeda dengan pemimpin liberal sebelumnya yang mengedepankan kerja sama internasional, Trump cenderung menolak komitmen multilateral bila dianggap merugikan kepentingan nasional (Anwar, 2023).

Karakter lain yang menonjol adalah transactional leadership. Trump memandang hubungan internasional sebagai transaksi bisnis: setiap komitmen, aliansi, atau perjanjian harus memberikan keuntungan nyata bagi Amerika Serikat. Sikap ini tampak jelas dalam relasinya dengan NATO, di mana ia berulang kali mengancam akan mengurangi dukungan AS bila negara-negara anggota lain tidak meningkatkan kontribusi finansial mereka. Begitu juga dengan aliansi Indo-Pasifik, Trump mengedepankan perhitungan pragmatis, bukan komitmen jangka panjang berbasis nilai.

Karakter kepemimpinan yang cenderung transaksional ini memang efektif dalam jangka pendek, karena menghasilkan tekanan bagi mitra internasional untuk memenuhi kepentingan AS. Namun, dalam jangka panjang, model ini menimbulkan ketidakpastian dan merusak kepercayaan strategis. Dari perspektif militer, gaya ini dapat memicu reposisi aliansi global dan mendorong negara-negara lain untuk memperkuat kemandirian pertahanan, karena menyadari ketidakpastian komitmen Amerika.

Kepemimpinan Trump membawa implikasi strategis yang sangat luas, terutama dalam reposisi aliansi internasional dan penguatan industri pertahanan domestik (Dorigné-Thomson, 2023).

1. Reposisi Aliansi Internasional

Salah satu dampak paling nyata dari kepemimpinan Trump adalah perubahan pola hubungan Amerika Serikat dengan NATO. Trump mengkritik keras negara-negara Eropa karena dianggap “menumpang gratis” pada keamanan yang disediakan AS. Ia menuntut anggota NATO untuk memenuhi kewajiban belanja pertahanan minimal 2% dari PDB mereka. Sikap ini membuat hubungan transatlantik mengalami ketegangan dan memunculkan keraguan mengenai komitmen jangka panjang AS dalam mempertahankan kolektif keamanan di Eropa.

Dalam Indo-Pasifik, Trump mempromosikan strategi *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) sebagai tandingan terhadap kebangkitan Tiongkok. Namun, pendekatannya lebih bersifat bilateral-transaksional ketimbang multilateral-kooperatif. Alih-alih memperkuat forum kawasan, Trump lebih mengutamakan kesepakatan perdagangan atau keamanan dengan negara tertentu, misalnya Jepang, India, dan Australia. Pendekatan ini secara implisit mendorong negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, untuk tidak bergantung sepenuhnya pada komitmen AS.

2. Industri Pertahanan Domestik

Trump menekankan bahwa kemandirian industri pertahanan adalah *non-negotiable*. Pemerintahannya mengalokasikan anggaran pertahanan yang sangat besar untuk memperbarui arsenal militer, mulai dari *nuclear triad* hingga modernisasi teknologi siber dan luar angkasa. Langkah ini bertujuan tidak hanya untuk memperkuat militer, tetapi juga menciptakan lapangan kerja domestik dan mendongkrak perekonomian nasional.

Implikasi globalnya adalah meningkatnya kompetisi industri pertahanan, di mana negara-negara lain terpaksa meningkatkan kapasitas domestik mereka agar tidak tertinggal. Indonesia, yang masih sangat bergantung pada impor alutsista, perlu mencermati strategi ini sebagai pelajaran penting untuk mempercepat pembangunan industri pertahanan nasional.

Tabel 2. Ringkasan Gaya Kepemimpinan Donald Trump

Aspek	Implementasi dalam Kepemimpinan Trump	Implikasi Strategis
-------	--	---------------------

Kebijakan <i>America First</i>	1. Tarif impor untuk baja & aluminium 2. Re-industrialisasi manufaktur 3. Eksploitasi energi shale gas	1. Proteksionisme ekonomi 2. Kemandirian logistik pertahanan 3. Ekspor energi sebagai instrumen geopolitik
Karakter Kepemimpinan	1. Populis-nasionalis 2. Proteksionis 3. Transactional leadership	1. Mobilisasi massa domestik 2. Kebijakan luar negeri pragmatis 3. Ketidakpastian aliansi global
Implikasi Strategis	1. Kritik terhadap NATO 2. Free and Open Indo-Pacific 3. Modernisasi arsenal militer	1. Reposisi aliansi global 2. Dorongan bagi negara lain untuk mandiri 3. Kompetisi industri pertahanan

Analisis terhadap gaya kepemimpinan Donald Trump menunjukkan bahwa kebijakan *America First* bukanlah kebijakan yang semata-mata didorong oleh ideologi proteksionisme, melainkan strategi realistis untuk memperkuat daya tahan nasional Amerika Serikat. Penekanan pada kemandirian logistik dan energi mencerminkan pemahaman mendalam bahwa dalam skenario konflik besar, ketergantungan pada pihak luar dapat menjadi titik lemah strategis. Karakter kepemimpinan populis–nasionalis terbukti efektif dalam memobilisasi dukungan domestik, namun proteksionisme dan gaya kepemimpinan transaksional menimbulkan ketidakpastian dalam hubungan internasional.

Bagi Indonesia, implikasi dari analisis ini sangat signifikan. Pertama, ada pelajaran penting dalam pembangunan kemandirian energi dan industri pertahanan domestik. Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada impor alutsista, karena kondisi geopolitik yang dinamis dapat membuat akses terhadap sumber daya strategis terganggu. Kedua, reposisi aliansi internasional di era Trump memberi sinyal bahwa negara-negara, termasuk Indonesia, harus memperkuat doktrin pertahanan yang berbasis pada kemandirian nasional, bukan semata bergantung pada komitmen eksternal. Ketiga, gaya kepemimpinan transaksional Trump menegaskan perlunya Indonesia untuk cermat dalam diplomasi pertahanan, agar tidak terjebak dalam hubungan yang hanya menguntungkan pihak besar dan melemahkan kedaulatan nasional.

Dengan demikian, analisis ini memberikan pemahaman bahwa meskipun gaya kepemimpinan Trump banyak menuai kritik, terdapat pelajaran strategis yang relevan bagi Indonesia, khususnya dalam penguatan doktrin pertahanan yang mandiri, adaptif, dan berakar pada nilai Pancasila serta kejujuran TNI.

Implikasi terhadap Doktrin Pertahanan Indonesia

Kepemimpinan Donald Trump dengan doktrin *America First* yang menekankan proteksionisme, kemandirian energi, dan kedaulatan industri pertahanan memiliki relevansi penting bagi Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar dengan posisi geostrategis vital di Indo-Pasifik, Indonesia menghadapi tantangan besar: modernisasi alutsista yang lambat, ketergantungan pada impor senjata, serta keterbatasan logistik pertahanan. Oleh karena itu, analisis implikasi kepemimpinan Trump dapat memberikan pelajaran penting untuk memperkuat doktrin pertahanan Indonesia yang berbasis pada kemandirian, adaptabilitas, dan nilai Pancasila (Wibawa, 2025).

Doktrin pertahanan Indonesia, yang dirumuskan melalui *Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta* (Sishankamrata), bertumpu pada partisipasi seluruh komponen bangsa. Namun, dalam era geopolitik modern, pendekatan ini perlu dikontekstualisasi ulang agar sesuai dengan dinamika perang hibrida, teknologi militer canggih, serta ancaman non-konvensional seperti siber dan energi. Gaya kepemimpinan Trump yang mengedepankan kekuatan domestik memberikan inspirasi bahwa pertahanan yang kuat tidak bisa dilepaskan dari fondasi industri, logistik, dan energi yang berdaulat (Rinawati and Rakhman, 2025).

Salah satu implikasi paling jelas bagi doktrin pertahanan Indonesia adalah urgensi kemandirian industri pertahanan. Trump menekankan bahwa sebuah negara besar tidak boleh bergantung pada suplai

alutsista dari luar negeri. Hal ini paralel dengan kondisi Indonesia, yang masih sangat tergantung pada impor peralatan tempur utama dari Amerika, Rusia, Eropa, hingga Korea Selatan. Ketergantungan ini menciptakan risiko kerentanan strategis, terutama jika terjadi embargo atau konflik kepentingan.

Indonesia sudah memiliki kerangka kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan yang menekankan kemandirian dan penggunaan alutsista dalam negeri. Namun implementasinya masih terbatas. Pelajaran dari Trump adalah bagaimana negara bisa menggunakan kebijakan fiskal, tarif, dan regulasi ketat untuk memastikan industri pertahanan domestik tumbuh menjadi tulang punggung kedaulatan nasional. Dengan kata lain, *proteksionisme pertahanan* harus diterapkan dalam kerangka pembangunan jangka panjang.

Kebijakan Trump dalam mengejar kemandirian energi memiliki makna strategis yang sangat relevan bagi Indonesia. Energi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga pertahanan. Dalam skenario perang, kemampuan negara untuk mempertahankan pasokan energi domestik adalah faktor penentu keberlanjutan operasi militer.

Indonesia masih menghadapi persoalan serius dalam ketergantungan energi, baik pada impor minyak maupun keterbatasan infrastruktur energi domestik. Sementara itu, doktrin pertahanan nasional belum sepenuhnya menempatkan energi sebagai aspek inti dari *force readiness*. Dengan belajar dari Trump, Indonesia perlu menempatkan pembangunan energi terbarukan, diversifikasi energi fosil, dan penguatan cadangan strategis sebagai bagian integral dari strategi pertahanan (Roza *et al.*, no date).

Trump menekankan pentingnya kemandirian logistik militer, yang ditopang oleh kapasitas industri domestik dan jaringan distribusi yang efisien. Indonesia dapat mengambil pelajaran ini untuk memperkuat doktrin Sishankamrata yang berbasis rakyat. Sishankamrata selama ini menekankan mobilisasi seluruh komponen bangsa dalam kondisi darurat, tetapi sering kali belum ditopang oleh sistem logistik yang memadai.

Dalam perang modern, logistik pertahanan mencakup tidak hanya distribusi alutsista dan amunisi, tetapi juga suplai energi, makanan, kesehatan, serta komunikasi berbasis teknologi tinggi. Dengan inspirasi dari pendekatan Trump, doktrin Sishankamrata perlu diperbarui agar mampu menjawab tantangan logistik pada era *multi-domain operations*.

Salah satu karakteristik Trump adalah *transactional leadership* yang menciptakan ketidakpastian dalam aliansi global. Bagi Indonesia, hal ini menjadi peringatan penting untuk tidak bergantung secara berlebihan pada jaminan keamanan dari negara besar.

Indonesia selama ini mengedepankan politik luar negeri bebas aktif, yang tidak terikat pada blok tertentu. Namun dalam praktiknya, modernisasi pertahanan sering kali dilakukan melalui kerjasama strategis dengan negara besar, seperti Amerika, Rusia, atau Tiongkok. Pelajaran dari gaya Trump adalah bahwa komitmen aliansi bisa berubah sewaktu-waktu, sehingga doktrin pertahanan Indonesia harus benar-benar berakar pada kemandirian nasional.

Tabel 3. Implikasi Kepemimpinan Trump terhadap Doktrin Pertahanan Indonesia

Aspek Strategis	Praktik dalam Kepemimpinan Trump	Implikasi bagi Doktrin Pertahanan Indonesia
Industri Pertahanan Energi	Proteksionisme, tarif impor, modernisasi arsenal domestik Eksplorasi shale gas, ekspor LNG, kemandirian energi	Percepatan kemandirian industri pertahanan, penguatan UU 16/2012, dan proteksi fiskal Diversifikasi energi, pembangunan cadangan strategis, energi sebagai faktor readiness
Logistik Pertahanan	Kemandirian logistik militer, re-industrialisasi	Modernisasi Sishankamrata, integrasi logistik sipil-militer, multi-domain readiness
Diplomasi Pertahanan	Transactional leadership, kritik terhadap NATO	Penguatan politik bebas aktif, fokus pada kemandirian, menghindari ketergantungan

Nilai kepemimpinan Trump tidak bisa diadopsi sepenuhnya karena bertolak belakang dengan idealisme Pancasila yang mengedepankan kerja sama, keadilan sosial, dan perdamaian dunia. Namun, aspek nasionalisme sumber daya yang ditunjukkan Trump sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045. Pancasila menempatkan kedaulatan rakyat sebagai sumber kekuatan, sementara doktrin pertahanan modern harus memadukan nilai tersebut dengan kebutuhan pragmatis seperti energi, logistik, dan industri.

Asta Cita 2045 menekankan visi Indonesia sebagai negara berdaulat, maju, adil, dan makmur. Dalam kerangka ini, pelajaran dari Trump dapat dimaknai sebagai dorongan untuk memperkuat ketahanan nasional dengan mengurangi ketergantungan pada pihak luar, sekaligus memastikan bahwa pembangunan pertahanan tidak mengabaikan kesejahteraan rakyat.

Implikasi gaya kepemimpinan Trump terhadap doktrin pertahanan Indonesia dapat dianalisis dalam tiga level (Samudro *et al.*, 2022).

1. Level Struktural: Indonesia perlu membangun struktur industri pertahanan yang kokoh, mirip dengan model proteksionisme yang dipraktikkan Trump. Namun, implementasinya harus memperhatikan realitas globalisasi dan kerja sama teknologi.
2. Level Operasional: Doktrin pertahanan harus menekankan kesiapan logistik dan energi sebagai prasyarat utama, bukan hanya persenjataan.
3. Level Normatif: Semua strategi harus berakar pada Pancasila dan falsafah perjuangan TNI, sehingga nasionalisme sumber daya tidak jatuh pada proteksionisme ekstrem yang dapat mengisolasi Indonesia.

Dengan pendekatan ini, doktrin pertahanan Indonesia dapat menjadi lebih adaptif, modern, dan berorientasi pada kemandirian nasional, tanpa meninggalkan prinsip bebas aktif dan semangat kerja sama internasional.

Refleksi dalam Bingkai Pancasila dan Nilai Perjuangan TNI

Setiap doktrin pertahanan nasional tidak hanya lahir dari kebutuhan praktis geopolitik dan militer, tetapi juga dari fondasi ideologis yang menjadi *leitmotif* bangsa. Bagi Indonesia, fondasi itu adalah Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi pemersatu, serta nilai perjuangan TNI yang lahir dari pengalaman historis perjuangan kemerdekaan dan pengabdian pada rakyat. Refleksi terhadap gaya kepemimpinan Donald Trump yang berorientasi pada *America First* harus ditempatkan dalam bingkai ini. Dengan demikian, proses adaptasi ide atau strategi yang relevan dari pengalaman Trump tidak menyalahi jati diri bangsa Indonesia, melainkan memperkuat ketahanan nasional yang berkarakter Indonesia (Wicaksana and Yakti, 2025).

Pancasila memuat lima sila yang saling berkaitan dan membentuk kerangka filosofis pertahanan nasional. Dalam refleksi terhadap gaya kepemimpinan Trump, beberapa poin dapat ditarik: (Dannhauer, 2024)

1. Ketuhanan Yang Maha Esa – Kepemimpinan Trump sering kali pragmatis dan berorientasi pada transaksi (*transactional leadership*). Refleksi Pancasila mengingatkan bahwa kepemimpinan bangsa tidak boleh sekadar mementingkan kepentingan sesaat, tetapi juga harus dilandasi nilai etika dan moral yang bersumber pada Ketuhanan. Dalam hal ini, penguatan pertahanan Indonesia harus selalu memperhatikan aspek moralitas, tidak hanya kepentingan material.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab – Kebijakan proteksionisme Trump kerap dikritik karena menimbulkan ketidakadilan global. Indonesia tidak bisa meniru hal ini secara penuh, sebab sila kedua mengajarkan bahwa pertahanan harus berfungsi melindungi segenap bangsa, tanpa diskriminasi, serta tetap mendukung perdamaian dunia.
3. Persatuan Indonesia – Nasionalisme yang Trump bangun sering kali eksklusif. Refleksi terhadap Pancasila justru menekankan nasionalisme inklusif, di mana pembangunan industri pertahanan dan energi harus menjadi perekat bangsa, bukan sumber ketimpangan. Misalnya, kemandirian energi tidak boleh hanya menguntungkan segelintir elite, tetapi harus memberi manfaat bagi seluruh rakyat.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan – Trump menunjukkan gaya kepemimpinan yang cenderung otoriter-populis. Pancasila mengajarkan sebaliknya: kepemimpinan nasional dalam bidang pertahanan harus partisipatif, transparan, dan berlandaskan musyawarah. Prinsip ini sejalan dengan sistem Sishankamrata, yang mengedepankan partisipasi seluruh rakyat.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia – Pancasila menegaskan bahwa pertahanan bukan semata urusan militer, tetapi juga instrumen untuk memastikan keadilan sosial. Refleksi

terhadap gaya Trump mengajarkan bahwa kemandirian industri pertahanan Indonesia harus dirancang agar menghasilkan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan memperkuat kesejahteraan rakyat.

Selain Pancasila, nilai kejuangan TNI merupakan bingkai praktis yang membimbing pembangunan pertahanan. Nilai ini lahir dari sejarah panjang pertempuran, pengorbanan, dan dedikasi dalam menjaga kedaulatan. Ada beberapa aspek refleksi: (Dorigné-Thomson, 2023)

1. Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme – Sejalan dengan semangat *America First*, TNI menempatkan kedaulatan bangsa sebagai hal utama. Namun, nasionalisme TNI bersifat *inklusif* dan *kolektif*, tidak menutup diri dari kerja sama internasional. Refleksi ini penting agar nasionalisme sumber daya Indonesia tidak terjebak pada proteksionisme sempit, melainkan tetap terbuka pada alih teknologi.
2. Disiplin dan Tanggung Jawab – Kepemimpinan Trump kerap kontroversial karena impulsif. Nilai kejuangan TNI menekankan pentingnya disiplin, profesionalisme, dan tanggung jawab kolektif. Dalam adaptasi, Indonesia perlu menyeimbangkan visi strategis kemandirian dengan perencanaan disiplin jangka panjang.
3. Rela Berkorban dan Pantang Menyerah – Trump banyak menekankan keberhasilan ekonomi sebagai basis kekuatan militer. Bagi TNI, kekuatan pertahanan tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga kesediaan rakyat berkorban. Refleksi ini memperkaya pemahaman bahwa doktrin pertahanan Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan sumber daya material, tetapi juga *spirit* kebangsaan.
4. Kebersamaan dan Gotong Royong – TNI dibangun dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nilai gotong royong inilah yang membedakan pendekatan Indonesia dari kepemimpinan Trump. Jika Trump menekankan unilateralism, Indonesia justru perlu mengedepankan kerja sama pertahanan berbasis kolektivitas bangsa dan solidaritas regional (ASEAN).

Hasil refleksi atas Pancasila dan nilai kejuangan TNI mengarah pada kebutuhan reorientasi doktrin pertahanan Indonesia dalam tiga aspek utama:

1. Nasionalisme Sumber Daya yang Berkeadilan
Indonesia bisa belajar dari Trump dalam hal kemandirian energi dan industri, tetapi tetap harus mengakar pada sila keadilan sosial. Artinya, setiap kebijakan proteksi industri pertahanan harus berdampak nyata pada kesejahteraan rakyat.
2. Kepemimpinan Partisipatif
Berbeda dengan *transactional leadership* Trump, kepemimpinan pertahanan Indonesia harus *participatory leadership*. Rakyat bukan sekadar obyek mobilisasi, tetapi subyek aktif dalam sistem pertahanan semesta.
3. Pertahanan Humanis dan Beretika
Nilai kemanusiaan Pancasila menegaskan bahwa strategi pertahanan harus menghormati hukum internasional dan hak asasi manusia. Hal ini menjadi pembeda yang signifikan dari gaya Trump yang cenderung *hard power oriented*.

Tabel 4. Refleksi Pancasila dan Nilai Kejuangan TNI terhadap Inspirasi dari Trump

Inspirasi dari Trump	Potensi Positif bagi Indonesia	Koreksi melalui Pancasila dan Nilai TNI
America First – kemandirian energi & industri	Mendorong percepatan kemandirian pertahanan dan energi domestik	Harus dibingkai dengan keadilan sosial & pemerataan manfaat
Transactional leadership	Menekankan efisiensi dan pragmatisme	Harus dilengkapi kepemimpinan partisipatif & musyawarah
Proteksionisme ekonomi	Melindungi industri pertahanan dalam negeri	Tidak boleh mengarah pada isolasi internasional
Reposisi aliansi internasional	Mendorong kemandirian strategis	Tetap menjaga prinsip bebas aktif & gotong royong ASEAN

Refleksi terhadap kepemimpinan Trump menunjukkan adanya peluang dan risiko. Peluangnya terletak pada dorongan kemandirian dan nasionalisme sumber daya. Risiko utamanya adalah jika

Indonesia meniru secara buta, yang bisa mengarah pada eksklusivitas dan proteksionisme berlebihan. Pancasila dan nilai perjuangan TNI berfungsi sebagai kompas moral dan praktis untuk menghindari jebakan tersebut.

Dengan demikian, Indonesia bisa mengambil inti positif dari kepemimpinan Trump yakni keberanian menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas tetapi membingkainya dengan nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan keadilan sosial. Hasilnya adalah doktrin pertahanan yang bukan hanya kuat secara material, tetapi juga kokoh secara moral dan ideologis.

Rekomendasi Strategis untuk Indonesia

Rekomendasi strategis bagi Indonesia dalam merespons dinamika global dan menyesuaikan diri dengan karakter kepemimpinan ala *America First* Donald Trump perlu dirumuskan dalam kerangka yang menyeluruh, integratif, dan dapat dieksekusi secara bertahap. Adaptasi dari semangat kemandirian yang ditunjukkan Trump pada dasarnya relevan bagi Indonesia, terutama dalam membangun *Domestic Defense Industrial Base* (DDIB) yang kuat serta mengurangi ketergantungan pada impor alutsista. Upaya konsolidasi BUMN industri pertahanan dengan tata kelola modern, kontrak kinerja yang transparan, serta kewajiban *offset* dan *co-production* minimal 35% dari setiap pengadaan luar negeri menjadi jalan awal menuju kemandirian. Pendekatan ini juga harus diiringi dengan kebijakan *local content first* dan mekanisme *life-cycle costing* untuk memastikan investasi yang berkelanjutan. Di saat yang sama, logistik pertahanan harus diposisikan sebagai tulang punggung dengan membangun *National Defense Supply Network* berbasis data yang mampu mengintegrasikan inventaris lintas matra dan wilayah. Dalam perspektif kesiapan tempur, cadangan strategis energi dan amunisi minimal 90–120 hari di titik-titik kunci seperti Selat Malaka, Lombok, dan Ombai-Wetar akan memperkuat daya tahan pertahanan nasional.

Sektor energi menjadi pilar fundamental kesiapan tempur yang tidak dapat diabaikan. Indonesia perlu mencontoh strategi *energy resilience* Amerika Serikat dengan membangun cadangan energi pertahanan, terutama untuk bahan bakar militer kritikal seperti JP-8 dan F-76. Diversifikasi energi melalui *micro-grid* berbasis energi terbarukan di pangkalan-pangkalan utama, penggunaan bahan bakar ganda pada pembangkit listrik militer, hingga uji coba *green bunker fuel* bagi armada laut akan meningkatkan ketahanan operasional dan mengurangi ketergantungan pada impor energi fosil. Untuk memastikan prioritas akses, kontrak jangka panjang dengan penyedia LNG dan avtur harus diformulasikan dengan klausul darurat yang memberi jalur khusus bagi kebutuhan militer saat krisis. Dari sisi sumber daya manusia, pembangunan *Defense Talent Pipeline* melalui integrasi pendidikan militer dan sipil, beasiswa ikatan dinas di bidang *STEM*, *AI*, siber, dan *space technology* merupakan investasi jangka panjang yang akan memastikan Indonesia memiliki generasi perwira dan ilmuwan pertahanan yang unggul. Konsorsium riset pertahanan terapan berbasis *triple helix* melibatkan TNI, perguruan tinggi, dan industri dapat memfokuskan riset pada sistem *UAS/USV*, *C4ISR*, *counter-drone*, hingga *undersea domain awareness*, disertai regulasi ketat mengenai uji coba dan *evaluation corridor* untuk meningkatkan kesiapan teknologi.

Dari segi doktrin dan kesiapan tempur, Indonesia perlu memperbarui konsep *Multi-Domain Operations* (MDO) agar mampu mengintegrasikan operasi darat, laut, udara, siber, ruang angkasa, dan informasi dalam satu *joint kill chain*. Pembentukan Komando Siber dan Informasi dengan fungsi *offense*, *defense*, dan *influence* harus segera diwujudkan, lengkap dengan *threat intelligence fusion center* serta kemampuan *hunt forward* untuk menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks. Latihan gabungan berbasis *wargaming* dan *digital twin* dapat menjadi instrumen strategis untuk menguji doktrin, mengidentifikasi kelemahan logistik, dan meningkatkan *readiness*. Indikator kinerja kunci seperti tingkat kesiapan misi alutsista utama minimal 75%, ketersediaan pasokan kritikal 90%, cadangan energi pertahanan 90 hari, hingga *mean time to detect/respond* insiden siber kurang dari 72 jam harus dijadikan standar pengukuran kemajuan.

Pada ranah diplomasi pertahanan, strategi bebas-aktif 2.0 perlu menekankan kemitraan teknologi yang fleksibel, di mana setiap negara mitra dipilih berdasarkan keunggulan spesifik, bukan ikatan blok. Mekanisme interoperabilitas harus dikembangkan tanpa mengorbankan kedaulatan, misalnya dengan membangun *data link* dan *crypto* nasional. Kerja sama kawasan dalam bentuk *ASEAN security commons* akan memperkuat stabilitas maritim dan menciptakan mekanisme *gray-zone management*

yang lebih efektif. Semua ini hanya bisa terwujud bila ditopang oleh kerangka hukum yang kokoh melalui UU dan PP tentang kemandirian pertahanan, pendanaan berlapis seperti *defense bonds* dan *public-private partnership*, serta pengawasan ketat lewat komisi independen. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia tidak hanya mampu mengadaptasi semangat kemandirian dari Trump, tetapi juga memadukannya dengan nilai Pancasila dan kejuangan TNI, sehingga lahirlah doktrin pertahanan yang adaptif, inklusif, berdaulat, dan siap membawa bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

KESIMPULAN

Gaya kepemimpinan Donald Trump, yang menekankan *America First*, proteksionisme, kemandirian industri pertahanan, dan pengelolaan energi sebagai instrumen strategis, memberikan pelajaran penting mengenai relevansi nasionalisme sumber daya bagi kekuatan dan kesiapan pertahanan suatu negara. Bagi Indonesia, refleksi terhadap pola kepemimpinan ini harus dilakukan secara selektif dan kontekstual, menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dasar Pancasila, semangat kejuangan TNI, serta prinsip doktrin pertahanan nasional berbasis Sishankamrata. Pengalaman Trump menekankan bahwa kemandirian logistik, diversifikasi sumber daya, dan modernisasi industri pertahanan bukan hanya faktor operasional, tetapi juga elemen strategis yang memperkuat *deterrence* nasional dan mengurangi ketergantungan pada aliansi atau pasokan eksternal. Dengan demikian, Indonesia perlu mengembangkan doktrin pertahanan yang adaptif terhadap ancaman multi-domain termasuk konvensional, siber, informasi, dan disrupsi rantai pasok serta mandiri dalam hal produksi alutsista, kesiapan logistik, dan cadangan energi. Doktrin ini harus berorientasi pada visi Indonesia Emas 2045 dengan memastikan bahwa setiap kebijakan pertahanan tetap inklusif, berkeadilan, dan selaras dengan pembangunan nasional, sehingga kemandirian strategis tidak hanya memperkuat kemampuan militer, tetapi juga mendukung kesejahteraan rakyat, stabilitas regional, dan keberlanjutan pembangunan nasional. Dengan memadukan pembelajaran dari gaya kepemimpinan global dan nilai-nilai lokal, Indonesia dapat membentuk doktrin pertahanan yang kuat secara materi, kokoh secara moral, serta tanggap terhadap tantangan geopolitik dan teknologi modern, sehingga memastikan kedaulatan, keselamatan, dan kemajuan bangsa secara berkesinambungan.

ACKNOWLEDGEMENT

Saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Sekolah Staf dan Komando TNI, khususnya Departemen Faljuang, atas bimbingan dan fasilitas yang diberikan selama penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada para dosen pembimbing, rekan tim, serta pakar dan praktisi militer yang telah memberikan wawasan dan masukan berharga. Dukungan, saran, serta bahan referensi yang diberikan telah sangat membantu dalam menyelesaikan penelitian ini secara sistematis dan mendalam, sehingga artikel ini dapat tersusun dengan baik dan memberikan kontribusi pada pengembangan wacana strategis pertahanan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. H. I. (no date) 'Gaya Kepemimpinan Donald Trump dalam Narasi 'Make America Great Again': Analisis Komunikasi Politik dan Identitas Nasional'.
- Anwar, D. F. (2023) 'Indonesia's hedging plus policy in the face of China's rise and the US-China rivalry in the Indo-Pacific region', in *Navigating International Order Transition in the Indo-Pacific*. Routledge, pp. 125–151.
- Asfar, M., Wicaksana, I. G. W. and Asfar, A. S. (2025) 'Why populist rule sustains during times of crisis: COVID-19, democracy and the state in Indonesia', *Asian Journal of Comparative Politics*. SAGE Publications Sage UK: London, England, 10(1), pp. 3–22.
- Aswan, M. A. (2025) 'ANALISIS KOMPARATIF IDIOSINKRATIK DONALD TRUMP DAN JOE BIDEN TERHADAP KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DALAM MEMANDANG POSISI TIONGKOK'. UNIVERSITAS SULAWESI BARAT.
- Bentley, S. (2023) *The maritime fulcrum of the Indo-Pacific: Indonesia and Malaysia respond to China's creeping expansion in the South China Sea*. Naval War College Press.
- Bhakti, A. et al. (2024) 'State Defense Strategy in Facing Cyber Threats After Hacking Incidents on Government Institutions: A Case Study in Indonesia', *Journal of Human Security*, 20(1), pp.

- Dannhauer, P. (2024) 'Elite role conceptions and Indonesia's agency in the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific: reclaiming leadership', *The Pacific Review*. Taylor & Francis, 37(1), pp. 30–55.
- Dorigné-Thomson, C. (2023) 'Indonesian Foreign Policy's Contemporary Evolution', in *Indonesia's Engagement with Africa*. Springer, pp. 67–127.
- Duarte, E. P. and Sos, S. (2025) *Manajemen Pertahanan Indonesia dalam Konteks Kebijakan Trump: Analisis dan Refleksi*. Indonesia Emas Group.
- Ernada, S. E. Z., Molasy, H. D. and Prabhawati, A. (2024) *Nasionalisme dan Etnopolitik dalam Hubungan Internasional: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Indonesia Emas Group.
- Leoni, Z. (2021) 'Trump's Grand Strategy: The Obama Doctrine Through the Lens of America First', in *American Grand Strategy from Obama to Trump: Imperialism After Bush and China's Hegemonic Challenge*. Springer, pp. 195–258.
- Purba, S. P., Windiani, R. and Paramasatya, S. (2022) 'Kebijakan Amerika Serikat Menyetujui Perjanjian Perdamaian dengan Taliban dan Penarikan Pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan di Masa Kepemimpinan Donald Trump', *Journal of International Relations Diponegoro*. International Relations, Faculty of Social and Political Sciences ..., 8(3), pp. 346–356.
- Rinawati, R. and Rakhman, S. (2025) 'DAMPAK KENAIKAN TARIF PAJAK TRUMP TERHADAP PERILAKU EKONOMI PERUSAHAAN HARLEY DAVIDSON DALAM MANAJEMEN SDM', *Jurnal Ilmu Manajemen Indonesia*, 3(1), pp. 10–24.
- Roza, L. M. K. *et al.* (no date) 'Dampak Kepemimpinan Donald Trump terhadap Diplomasi Sains Amerika Serikat melalui US Science Envoy Program'.
- Samudro, E. *et al.* (2022) 'Defence Science in Contributing Indonesia Economic Growth: Indonesia 2045', *The Seybold Report Journal*, 17, pp. 1008–1022.
- Wibawa, P. A. B. (2025) 'Analisis Gaya Kepemimpinan dan Konstruksi Sosial dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Era Trump'. Universitas Gadjah Mada.
- Wicaksana, I. G. W. and Yakti, P. D. (2025) 'Indonesia's New Partial Multialignment Strategy: A Conceptual and Empirical Analysis', *TRaNS: Trans-Regional and-National Studies of Southeast Asia*. Cambridge University Press, pp. 1–18.
- Yufriadi, F. (2023) 'Mohammad Natsir Thought on Reactualising Religious Nationalism in Indonesia', *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies*, 2(1), pp. 139–149.